

ABSTRAK

Dalam sengketa wanprestasi utang piutang yang dalam gugatannya diajukan permohonan peletakan sita jaminan melalui upaya hukum melalui pengadilan sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan oleh Penggugat dalam hukum acara perdata Indonesia. Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat sebagai kreditur atau si berpiutang sebagai bentuk iktikad baik terhadap hubungan kontraktual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan dalam sengketa wanprestasi utang piutang dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tata cara atau proses pengajuan permohonan sita jaminan dan pembuatan *dissenting opinion* putusan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu sengketa keperdataan.

Penelitian ini adalah penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif sebuah penelitian hukum yang meneliti hukum dalam bentuk norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, dan jenis kepustakaan lain yang digunakan untuk membantu menjawab sebuah permasalahan hukum yang terjadi penulis juga melakukan metode wawancara pada narasumber sebagai praktisi yang berkaitan dengan permohonan peletakan sita jaminan dalam gugatan wanprestasi utang piutang.

Dalam penelitian hukum ini diketahui bahwa dasar hukum dan prosedur pengajuan permohonan peletakan sita jaminan pada Pengadilan Negeri. Kemudian dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan serta menolak permohonan peletakan sita jaminan dalam sengketa wanprestasi utang piutang dimana dalam putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr terdapat *dissenting opinion* oleh Hakim Anggota II terkait dengan keabsahan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan yang berkorelasi terhadap ditolaknya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan Penggugat. Semua pembahasan dalam penulisan ini juga dilengkapi dengan pendapat hakim serta pengacara yang sudah sering menghadapi sengketa-sengketa keperdataan.

Kata Kunci: *Permohonan, Sita Jaminan, Dissenting Opinion, Wanprestasi, Utang Piutang.*

ABSTRACT

In the legal dispute of breach of contract debt default and receivables, the filing of a petition for the imposition of a lien through legal action in court, which involves security seizure, is a common practice by the Plaintiff in Indonesian civil procedural law. The Defendant has an obligation to settle their obligations to the Plaintiff as the creditor or the party owed, as a form of good faith towards the contractual relationship agreed upon by both parties.

The purpose of this legal research is to determine the differences in the dissenting opinion of the panel of judges in granting or denying the petition for a lien in the dispute of breach of contract debt default and receivables in Judgment Number 252/Pdt.G/2020/PN Mtr. Additionally, this research also aims to understand the procedures or process of filing a petition for a lien and the preparation of dissenting opinion by the Panel of Judges in adjudicating a civil dispute.

This research falls into the category of normative legal research, which examines law in the form of norms, rules, principles, doctrines, legal theories, and other literature used to help answer a legal issue that arises. The author also conducted interviews with practitioners related to the filing of requests for lien in cases of debt default and receivables.

In this legal research, it is known that the legal basis and procedure for filing a request for a lien in the District Court. Then, the basis for the consideration of the panel of judges in granting or denying the request for a lien in the dispute of debt default and receivables, where in Decision Number 252/Pdt.G/2020/PN Mtr there is a dissenting opinion by Associate Judge II regarding the validity of an agreement made in the form of a handwritten agreement which correlates to the rejection of the Plaintiff's request for a lien. All discussions in this writing are also supplemented with the opinions of judges and lawyers who have often dealt with civil disputes.

Keywords: *Petition, Security Seizure, Dissenting Opinion, Breach of Contract, Debt and Receivables.*